



▶ PERLINDUNGAN ANAK

PAUD Harus Diawasi dan Dievaluasi

UMBULHARJO—Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah *daycare* di Jogja memicu reaksi keras dari kalangan legislatif.

*Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com*

Dewan mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nurcahyo Nugroho, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut sekaligus mendorong penguatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kasus ini mencuat ke publik setelah muncul ulasan di *Google Maps* yang mengungkap dugaan praktik kekerasan

▶ **Komisi A mendesak polisi mengusut kasus sekaligus mendorong penguatan pengawasan terhadap PAUD.**

▶ **Dinas Pendidikan harus mengevaluasi seluruh lembaga penitipan anak di Kota Jogja.**

di dalam lingkungan *daycare* Little Aresha. Laporan tersebut menyebutkan adanya tindakan tidak manusiawi terhadap anak-anak, mulai dari diikat, diseret, hingga dipukul oleh oknum pengasuh.

Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya upaya pembungkaman terhadap korban dengan memberikan doktrin agar anak-anak tidak menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tua mereka. Saat ini, polisi telah

menetapkan 13 orang sebagai tersangka dan memasang garis polisi di lokasi kejadian.

Nurcahyo menilai peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak yang tidak bisa ditoleransi. Ia meminta masyarakat, khususnya para orang tua yang merasa anaknya menjadi korban, untuk berani melapor agar proses hukum dapat berjalan secara menyeluruh. "Saya mendorong semua pihak yang memiliki informasi atau mengalami langsung kejadian serupa untuk segera melapor. Ini penting agar kasus ini terang benderang dan pelaku mendapatkan hukuman setimpal," ujarnya, Sabtu (25/4).

Pengawasan PAUD

Selain penegakan hukum, Nurcahyo juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat

pengawasan terhadap lembaga PAUD. Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Jogja untuk mengevaluasi seluruh lembaga penitipan anak, baik yang sudah beroperasi maupun yang akan berdiri.

Komisi D juga mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban. Menurutnya, pemulihan trauma menjadi langkah krusial agar anak dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.

Sementara, Kepala DP3AP2KB Kota Jogja, Retnaningtyas, menyampaikan langkah penanganan telah dilakukan secara paralel, termasuk pendampingan terhadap anak-anak dan orang tua yang terdampak.

Pendataan terhadap seluruh anak yang sebelumnya ditiptikan di *daycare* tersebut telah dilakukan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan pendampingan psikologis serta bantuan konseling hukum bagi keluarga. "Pendampingan ini penting agar anak-anak tetap mendapatkan perlindungan dan rasa aman pascakejadian," katanya, Sabtu.

Retnaningtyas menegaskan bahwa hasil pengecekan lintas instansi menunjukkan *daycare* tersebut belum memiliki izin resmi. Karena itu, pemerintah mendata semua tempat penitipan anak di Kota Jogja. Pendataan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kader di tingkat kelurahan hingga koordinasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan dinas terkait. Langkah ini diharapkan mampu memetakan kondisi riil di lapangan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005